

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
PADA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN
DI KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010**

Ita Musfirowati Hanika, Dyah Lituhayu

Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

**Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan
pada simpan pinjam perempuan di kecamatan kembang kabupaten jepara
tahun 2010**

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri dan berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perdesaan hadir untuk meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial untuk membantu sesama dalam peningkatan kesejahteraan secara lebih mandiri. Penelitian mengambil fokus pada pembangunan di bidang ekonomi yaitu Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini untuk menunjukkan sejauh mana pelaksanaan dan hambatan program SPP di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang melalui wawancara secara langsung (*interview guide*) dengan narasumber yaitu Kepala Kecamatan Kembang, PJOK PNPM, Ketua Unit Pelaksana Kegiatan, Fasilitator Kecamatan dan Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Pada proses pelaksanaannya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang menghasilkan berbagai manfaat positif bagi masyarakat (perempuan). Diantaranya telah mampu membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan taraf hidup kaum perempuan dan menjadi pribadi yang aktif, walaupun dalam pelaksanaan program muncul berbagai hambatan dalam pelaksanaannya tetapi hal ini perlu menjadi perhatian dari tim fasilitator kecamatan dan PNPM-MP Kecamatan Kembang agar pelaksanaan PNPM-MD selanjutnya berjalan lebih baik.\

Kata Kunci: PNPM Mandiri Perdesaan, Simpan Pinjam Perempuan, Partisipasi

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah tingkat pedesaan. Tujuan utama program ini adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat di tingkat pedesaan dengan memandirikan anggotanya. Program PNPM ini terdiri dari tiga program pokok yang sudah ajeg disusun oleh pemerintah pusat, yaitu pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembiayaan program ini berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan. Mekanisme berjalannya program ini sepenuhnya mengadopsi mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri sendiri diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program ini dalam pelaksanaannya memusatkan kegiatan bagi masyarakat paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan programnya seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap

tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, hingga pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Program ini sangat strategi karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (sosial capital) masyarakat di masa mendatang, serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Lembaga kepemimpinan masyarakat tersebut, disebut juga Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (disingkat BKM/ LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai – nilai luhur kemanusiaan dan nilai – nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial kehidupan masyarakat. BKM/ LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Dalam studi kali ini penulis akan mengkaji mengenai SimpanPinjam Perempuan (SPP) melalui program PNPM Pedesaan yang terletak di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.

Program ini merupakan salah satu produkprogram pembangunan PNPM Pedesaan di bidang pembangunan ekonomi. Program tersebut diperuntukkan untuk para wanita yang akan memulai usaha dan/ atau yang sudah mempunyai usaha. Dalam berjalannya program ini terdapat beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) yang berperan dalam berjalannya program tersebut, yaitu: pihak aparaturn desa (Kades, Sekdes, dan Fasilitator Desa), UPK (Unit Pelaksana Kegiatan), TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), monitoring dan juga Anggota KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan) itu sendiri sebagai penerima manfaat.

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana proses implementasi Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang pada Tahun 2010?
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam pelaksanaan program tersebut?
3. Hambatan apa yang ditemui selama proses pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang?

1.3. Tujuan dan Signifikansi Penulisan

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan khususnya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2010.

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2010.
- 3) Untuk menemukan hambatan dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan khususnya Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2010

1.4 Kerangka Teori

Dalam melakukan penulisan mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan pada Simpan Pinjam Perempuan, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan dalam menganalisa kasusnya menggunakan beberapa teori sebagai acuan yang ada, dalam hal ini implementasi kebijakan pemerintah. Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan publik, di dalam implementasi kebijakan ada berbagai teori yang dikembangkan, dalam penulisan ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter Van Horn, Elmore, dan Weimer dan Vinning A, tetapi yang akan menjadi fokus adalah teori Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn.

Model ini disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu

kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan secara optimal yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, indikator-indikator tersebut yaitu:

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan antar pelaksana
- d. Karakteristik badan pelaksana
- e. Kondisi sosial, ekonomi, politik
- f. Sikap/ Disposisi

1.5 Prosedur Penulisan

1.5.1 Rancangan Penulisan

Lokasi yang dipilih pada kajian ini adalah PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kembang Pada mulanya lembaga ini berperan aktif untuk mengelola hasil bantuan dari World Bank yang akan dipergunakan sebagai modal usaha masyarakat. Bantuan ini dikelola oleh UPK. Namun karena dana yang dikucurkan terbatas sehingga para penerima manfaat sering mengeluh karena modal mereka untuk usaha jadi sulit didapat. Dampak dari semua ini adalah membuat kinerja PNPM Mandiri

pedesaan tersebut belum berjalan dengan semestinya, yaitu memberdayakan masyarakat di pedesaan.

Penulisan ini didukung oleh data data primer dan sekunder yang berkaitan dengan dinamika PNPM Mandiri sebagai lembaga masyarakat lokal. Data primer dalam penulisan ini meliputi data wawancara mendalam pengamatan langsung, observasi serta field note dan diary. Data sekunder berasal dari RT,RW, Kelurahan/ Kantor desa, buku atau studi literature lainnya yang mendukung dalam penulisan ini.

Arena sosial dalam penulisan ini yang kami anggap penting untuk diangkat adalah:

- 1) Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan
- 2) Aktor-aktor yang terlibat dan peran masyarakat dalam program ini
- 3) Kegiatan dan program yang dijalankan guna memberdayakan masyarakat sekitar.
- 4) Probelmatika dalam pelaksanaan program tersebut
- 5) Manfaat yang diterima oleh penerima kelompok simpan pinjam perempuan

BAB II

PEMBAHASAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) merupakan sebuah program pemerintah yang berasal dari dana APBN yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih mandiri dan terberdaya. Secara umum, PNPM Mandiri memiliki 3 program pokok yang dijalankan untuk memberdayakan masyarakat, yaitu program sosial, program ekonomi, dan program pembangunan fisik.

Program Simpan Pinjam Perempuan (selanjutnya disebut SPP) merupakan salah satu dari produk program pembangunan dengan fokus ekonomi yang dikeluarkan oleh PNPM Mandiri Pedesaan. Seperti namanya “Simpan Pinjam Perempuan”, program SPP ini memang difokuskan untuk pemberdayaan dan pembangunan khusus pada kaum perempuan saja. Kehadiran program SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kembang, diawali dari adanya tawaran program dari pemerintah, yakni program dana pinjaman untuk Pembangunan Percepatan Desa Tertinggal (PPDT). Mengetahui adanya program tersebut, warga desa yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa (seperti Fasilitator Desa) mengkonsepkan proposal yang akan diajukan. Setelah hal tersebut mendapat respon baik dari warga desa maka selanjutnya diadakan musyawarah antar dusun untuk membahas mengenai penentuan dusun mana yang akan didahulukan dan kebutuhan apa yang harus diprioritaskan lebih dahulu untuk kepentingan desa dan warga masyarakatnya (seperti

apa pembangunan jalan dahulu atau bantuan modal guna pengembangan usaha masyarakat dulu). Kemudian hasilnya dimusyawarahkan lagi di kantor desa dan selanjutnya bila sudah ditentukan mana yang akan diprioritaskan, maka oleh Faskel akan langsung diajukan ke Kecamatan.

Penentuan desa mana yang mendapat lebih dulu, ditentukan berdasarkan desa mana yang lancar dalam pengembalian dan yang memiliki potensial terbesar dalam memberdayakan masyarakatnya. Setelah ditentukan bahwa Kecamatan Kembang mendapatkan dana bantuan PNPM Mandiri Pedesaan lebih dulu, maka kemudian dipilihlah para ketua KSPP yang akan bertanggungjawab dalam pengelolaan dana dan penentuan penerima manfaat. Ketua KSPP pun dipilih dari warga perempuan yang aktif dalam kegiatan pembangunan desa ataupun aktif mengikuti penyuluhan/ sosialisasi dari PNPM Mandiri Pedesaan.

Dalam pelaksanaan program SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini terdapat beberapa *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang memiliki peranan penting, mulai dari masyarakat (pemanfaat), Ketua KSPP, Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Monitoring, dan aparatur desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Staf). UPK berperan dalam menyalurkan dan menyimpan dana bantuan. TPK berperan sebagai penanggungjawab kegiatan dan mengawasi ketua kelompok selama berjalannya program. Sedangkan, monitoring berperan dalam mengawasi kinerja TPK selama berjalannya program tersebut. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari bantuan dana tersebut dan ketua KSPP sebagai yang bertanggungjawab

atas anggota dan dirinya sendiri dalam pengelolaan dana dan penentuan anggota penerima manfaat.

Aparatur desa sendiri memiliki banyak peran, diantaranya berperan dalam memfasilitasi jalannya program SPP (seperti menyediakan tempat untuk rapat atau penyuluhan, dalam menyediakan sarana dan prasarana berjalannya program SPP (seperti melegalkan hasil keputusan rembug desa), dalam mengawasi jalannya program SPP, dan juga berperan dalam pembinaan (seperti membina saat penyuluhan dan membina anggota penerima manfaat yang telat atau kesulitan membayar iuran pengembalian dana SPP).

Fasilitator Desa (Fasdes) sebagai bagian dari aparat desa berperan dalam memfasilitasi jalannya program pembangunan desa. Dalam berjalannya program SPP ini, Fasdes berperan dalam mensosialisasikan program SPP dan memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan usulan ke desa dan mengajukan proposal ke UPK. Jadi Fasdes bertanggungjawab dalam proses pengajuan permohonan dana pinjaman SPP dan juga saat ada hambatan dalam pengembalian iuran dana SPP ke UPK. Fasdes akan memberikan penyuluhan dan binaan kepada anggota kelompok SPP yang bermasalah, agar seluruh warga desa mengetahui dan tertarik untuk mengikuti program SPP PNPM Mandiri Pedesaan ini, maka digunakan sarana sosialisasi melalui rapat-rapat di musyawarah dusun ataupun dalam penyuluhan-penyuluhan di kantor desa. Sosialisasi juga dilakukan hingga ke tingkat RT/RW melalui penyuluhan-penyuluhan.

Salah satu syarat utama untuk menjadi anggota penerima manfaat dana SPP ini pun, salah satunya diharuskan sering mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Penyuluhan tersebut dilakukan secara berkelanjutan agar anggota penerima manfaat dana SPP ini paham betul tentang program dan tujuan akhir dari program SPP tersebut. Sehingga target penyaluran dana bantuan SPP menjadi tepat sasaran dan dapat terberdaya warga masyarakat yang menggunakannya. Penyuluhan dilakukan sebanyak 5 (lima) hingga 7 (tujuh) kali pertemuan, yang membahas mengenai program SPP secara lebih mendalam.

2.1. Syarat Penerima Manfaat dan Sistematisa Pencairan Dana

Untuk menjadi penerima manfaat syarat yang ditetapkan sangat mudah sekali, yakni hanya menyerahkan foto copy KTP, dan sudah mempunyai usaha mikro (seperti warung kelontong, jual pulsa, dll.). Akan tetapi dalam pemilihan siapa saja yang berhak menerima bantuan dana yaitu anggota kelompok SPP, ditetapkan oleh ketua kelompok yang sebelumnya sudah dipilih oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Ketua kelompok yang memiliki wewenang karena dianggap mampu melihat target penerima manfaat dengan tepat dan objektif, karena ketua kelompoklah yang melihat bagaimana kehidupan masyarakat secara lebih riil.

Dalam SPP bantuan modal yang diberikan kepada penerima manfaat (kaum perempuan) tahap awal sebesar Rp 1.000.000,- untuk tiap anggota. Akan tetapi penerima manfaat tidak menerima modal dalam jumlah Rp 1.000.000,- utuh, melainkan ada sejumlah uang yang harus dialokasikan untuk beberapa hal, yakni: (1)

Rp 50.000,- untuk tabungan tiap anggota yang sifatnya wajib. Tabungan tersebut nantinya akan difungsikan untuk dana talangan bagi anggota yang tidak mampu membayar angsuran ditiap bulannya. Sistem tersebut dinamakan “tanggung renteng”.

(2) Rp 4.000,- dialokasikan untuk asuransi yang bersifat hibah. Asuransi digunakan untuk membayar angsuran anggota kelompok yang mengalami musibah, seperti kecelakaan, meninggal, sakit bersifat permanen atau yang dianggap tidak mampu untuk mencari uang guna membayar angsuran. (3) Rp 3.000,- sampai dengan Rp 5.000,- atau sesuai dengan kesepakatan kelompok, yang dialokasikan untuk administrasi dan diberikan kepada pihak UPK. Jadi tiap individu akan menerima dana SPP sebesar Rp. 943.000,- hingga Rp 941.000,- hal ini tergantung pada besar atau kecilnya biaya administrasi yang dikeluarkan.

2.2. Sistematika Pembayaran Angsuran Dana Pinjaman

Angsuran setiap bulannya yang harus dibayar oleh masing-masing penerima manfaat sebesar Rp 104.000,-. Dana Pinjaman SPP dapat dikembalikan dengan jangka waktu setahun. Angsuran bebas dilakukan kapan saja, yang terpenting dalam setahun tersebut pinjaman bisa dilunasi secara tepat waktu. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa dalam sistem angsuran SPP ke UPK sangat fleksibel sekali. Sehingga mempermudah masyarakat (penerima manfaat) dalam menyetorkan angsuran, dan merasa tidak terlalu terbebani. Dengan kemudahan dalam pengembalian angsuran ditiap bulannya, apabila terdapat penerima manfaat yang tidak dapat mengembalikan dana pinjaman atau dikenal dengan kredit macet, maka si

penerima manfaat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi, yaitu namanya akan di “black list” dan tidak akan diberikan kesempatan kembali untuk meminjam kembali. Dengan sanksi yang sedemikian rupa memang dirasa tidak tegas. Karena tidak ada sanksi yang jelas untuk kesalahan tersebut. Dan hal ini mungkin menjadi sebuah dilema, karena di satu sisi sebaiknya dalam menghadapi masyarakat pedesaan setiap peraturan yang dijalankan harus bersifat fleksibel, dan di sisi lain apabila tidak terdapat sanksi yang tegas akan dikhawatirkan apabila terdapat permasalahan serius dalam kredit macet maka masalah tersebut akan berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Dan berdasarkan informasi yang didapati dari Sekretaris Desa, apabila didapati kredit macet di desa yang mendapatkan bantuan dana pinjaman bergulir (melalui program SPP) maka desa tersebut akan mendapatkan sanksi yakni tidak akan mendapatkan program bantuan di lain waktu.

2.3. Implikasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada PJOK PNPM Kecamatan Kembang dan Ketua UPK, masuknya program SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kembang mendapat respon yang sangat baik dari masyarakatnya. Karena banyak dari nara sumber mengungkapkan, bahwa mereka sangat tertarik sekali untuk turut serta dalam program SPP tersebut. Dengan adanya bantuan dana yang diberikan mereka berharap dapat mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dan masyarakat (khususnya, kaum perempuan) sangat berterima kasih dengan adanya

bantuan dana SPP ini, karena sejak dilaksanakannya para pemanfaat dapat menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi mereka, seperti bebas dari jeratan bank keliling dan kaum perempuan di Kecamatan Kembang dapat menjadi lebih mandiri dan berdaya, karena kini mereka tidak lagi hanya bergelut dalam ranah privat saja, akan tetapi juga sudah berada di ranah publik. Mereka sudah dapat bertransformasi menjadi perempuan yang aktif dalam beberapa kegiatan desa (salah satunya kegiatan PKK) dan mengelola serta mengembangkan usaha yang telah mereka miliki.

2.4. Permasalahan dari pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan

Permasalahan pertama mengenai keterbatasan dana yang diterima untuk Simpan Pinjam Perempuan, contoh kasus; terdapat 10 kelompok yang telah diverifikasi dan kemudian mendapatkan giliran dalam pencairan dana, kelompok 1 sampai kelompok 5 yang mendapatkan prioritas tertinggi karena memenuhi standar maksimal saat melakukan verifikasi data, selanjutnya diikuti kelompok 6 sampai kelompok 10. Tetapi dalam masa peralihan antara kelompok 5 ke kelompok 6 ini sering mengalami keterlambatan pencairan dana hingga 3bulan lamanya dikarenakan terbatasnya anggaran yang tersedia.

Permasalahan selanjutnya mengenai sumber daya manusia, keterbatasan SDM sering menjadi permasalahan pokok di dalam lingkup proses kegiatan Simpan Pinjam Perempuan ini, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) tim pengelola kegiatan di perdesaan SDM pengelola di tingkat desa yang di bawah standar, sehingga dalam

pengelolaan anggaran atau pembuatan proposal pun masih harus perlu pendamping, kemudian terbatasnya SDM yang bekerja di Unit Pengelola Kegiatan dalam melakukan verifikasi jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan.

Permasalahan temuan ketiga yang terdapat di lapangan yaitu terdapat beberapa anggota kelompok yang menerima bantuan akan tetapi mereka tidak memiliki usaha, dan bantuan tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Menurut yang bersangkutan, apabila mereka ingin memulai usaha, mereka merasa takut merugi. Permasalahan ini merupakan sebagai bentuk dari kesalahan dalam penggunaan dana Simpan Pinjam Perempuan.

Selain itu permasalahan yang ada yakni, pengembangan usaha yang kurang maksimal (khususnya perempuan di tingkat mikro), karena tidak adanya pelatihan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Tersendatnya proses pemberdayaan perempuan karena adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah sehingga target penerima manfaat masih dalam jangkauan yang relatif sedikit. Berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap dana SPP, dikarenakan tidak adanya penerapan aturan main yang tegas dan jelas, dalam hal ini berkaitan dengan batasan peminjaman dana. Padahal mengenai batasan peminjaman telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Tidak semua masyarakat mengetahui program SPP dan adanya perbedaan pada pemahaman dan pelaksanaan terhadap program SPP hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang jelas dan tidak maksimal.

KESIMPULAN

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang telah berjalan di Kecamatan Kembang semenjak tahun 2007 sudah menghasilkan sejumlah 200 Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang tersebar di berbagai desa. Dalam pelaksanaannya program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan ini memberikan manfaat bagi kaum perempuan, tetapi di lain sisi masih memiliki beberapa kekurangan. Manfaat yang dirasakan oleh para target sasaran program ini (perempuan) yaitu memenuhi kebutuhan konsumtif dalam kegiatan sehari-hari, terbebas dari jeratan lintah darat, mengembangkan usaha mikro yang telah kaum perempuan miliki sebelum menerima bantuan modal (seperti: usaha kredit, pengasapan ikan, pembuatan kerupuk, dll), menjadikan wanita lebih berdaya dan mandiri sehingga mampu bertransformasi ke ranah publik seperti aktif dalam kegiatan PKK, dan mampu mengelola usaha mikro yang mereka miliki.

Dalam pelaksanaannya, implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Kembang mengutamakan pemberdayaan yang mengembangkan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengembangan ekonomi. Pelaksanaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari masyarakat sebagai penerima kebijakan hingga pemerintah tingkat kabupaten.

Faktor-faktor yang terdapat dalam implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Kembang pada dasarnya sudah cukup baik sehingga pelaksanaan

bisa berjalan secara kondusif, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan yang ada di lapangan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di agen pelaksana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sehingga kinerja menjadi kurang optimal, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat masyarakat yang mengakibatkan pada ketergantungan dalam pembuatan proposal dan pemahaman yang salah terhadap esensi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), keterbatasan anggaran yang menimbulkan tersendatnya pelaksanaan dan tidak adanya pelatihan peningkatan *skill* sehingga pemberian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadi kurang bermanfaat.

Berdasarkan dari kajian – kajian teori terhadap program SPP ini terlihat sekali bahwa kurangnya akan sistem pengorganisasian, lemahnya pengawasan pada pengguna dana pinjaman secara individu karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga pinjaman tidak digunakan dengan semestinya dan berpotensi menimbulkan ketergantungan karena sistem pengorganisasian yang tak jelas dan sanksi yang tidak tegas karena masyarakat beranggapan kalau pinjaman ini akan terus menerus dan memang layak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan hal – hal yang terjadi seperti di atas mengakibatkan pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Kembang tidak dapat berjalan secara optimal.

Saran

Berdasarkan permasalahan yang muncul maupun hal-hal yang berpotensi menjadi masalah dari pelaksanaan Program SPP di Kecamatan Kembang, peneliti merekomendasikan beberapa hal. Berikut adalah rekomendasi yang diajukan:

1. Batasan pinjaman untuk kelompok peminjam harusnya diperjelas dengan memberikan aturan yang tegas karena menyesuaikan dengan anggaran dana (SPP) yang tersedia.
2. Memperhitungkan jumlah staff yang tersedia dengan jumlah Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (KSSP) agar tidak terjadi “*double job*” dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Sosialisasi dijelaskan secara lebih intensif agar masyarakat dapat lebih mengerti dan memahami tentang esensi program.
4. Tim Konsultan Fasilitator hendaknya menyiapkan dan membuat sarana publikasi seperti poster, leaflet, dan spanduk yang lebih menarik.
5. Harus terdapat sanksi yang tegas agar pelaksanaan SPP dapat berjalan dengan baik. Sehingga apabila terdapat kemacetan dalam pengembalian dan kesalahan dalam penggunaan dana pinjaman dapat terselesaikan secara cepat
6. Apabila sudah ada pemanfaat yang mandiri, agar dimitrakan dengan bank atau swasta agar dapat meminjam modal lebih besar, sehingga usaha mereka dapat berkembang lebih besar.
7. Diselenggarakannya pelatihan guna peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk kaum perempuan dalam rangka pemberdayaan

masyarakat (seperti: pelatihan manajemen keuangan, pelatihan pembuatan kerajinan yang memanfaatkan SDA di desa, pelatihan membuat kue, pelatihan menjahit, dsb).